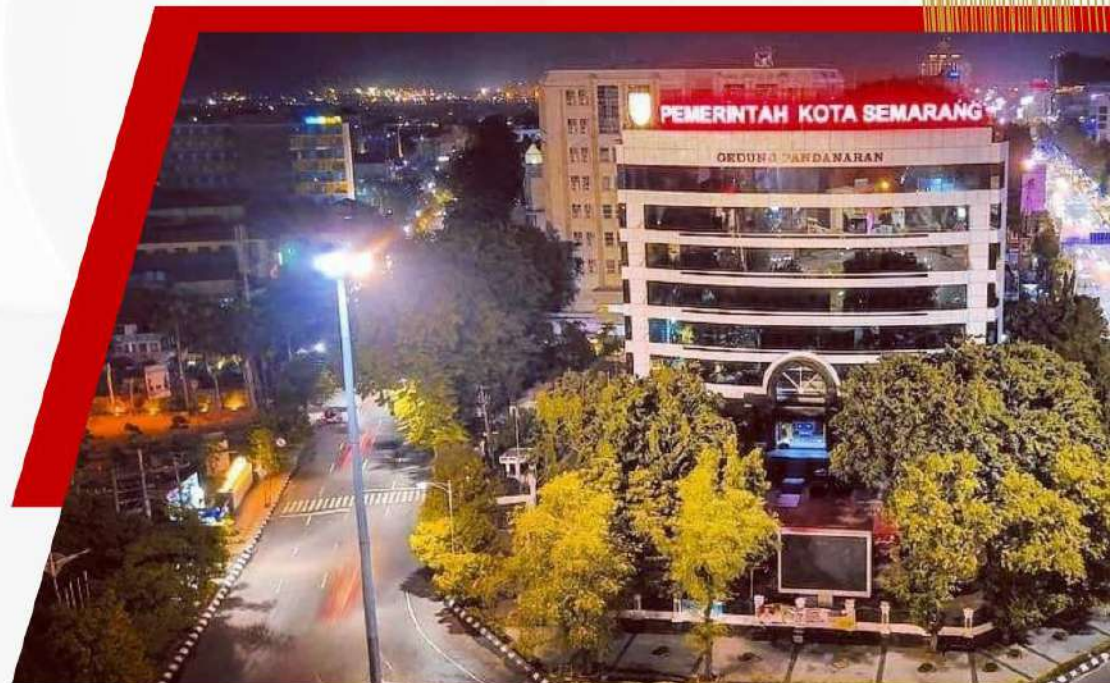




RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

TAHUN 2025





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jln. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086 Fax. 3584085 Hunting 3584077 Psw. 2710, 2712

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
NOMOR : B/097/050/VII/2024

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 maka perlu disusun Rencana kerja Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas. perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tentang Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- h. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
- t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
- v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

- w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35);
- x. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Nomor B/210/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025;
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Perencanaan Pembangunan (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025;
- KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya di tahun 2025;
- KEEMPAT : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 30 Juli 2024

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


BAMBANG SURANGGONO

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang (sebagai laporan);
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Bappeda Kota Semarang;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA SEMARANG
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2025



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025, untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta indikatornya serta program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini belum sempurna, maka dari itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semarang, 30 Juli 2024

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

FX BAMBANG SURANGGONO, S.Sos



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.2 LANDASAN HUKUM.....	I-2
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I-6
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	I-6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU	II-1
II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG.....	II-1
II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	II-16
II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG.....	II-21
II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD	II-23
II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ..	II-34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	III-1
III.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	III-1
III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	III-7
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	IV-1
IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.....	II-2
Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023	II-13
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023	II-17
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Program dan Palayanan Kinerja Urusan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023	II-19
Tabel 2. 5 Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024	II-20
Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	II-26
Tabel 2. 7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	II-34
Tabel 3. 1 Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025 ..	III-7
Tabel 3. 2 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025	III-9
Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang..	IV-3

DAFTAR GAMBAR

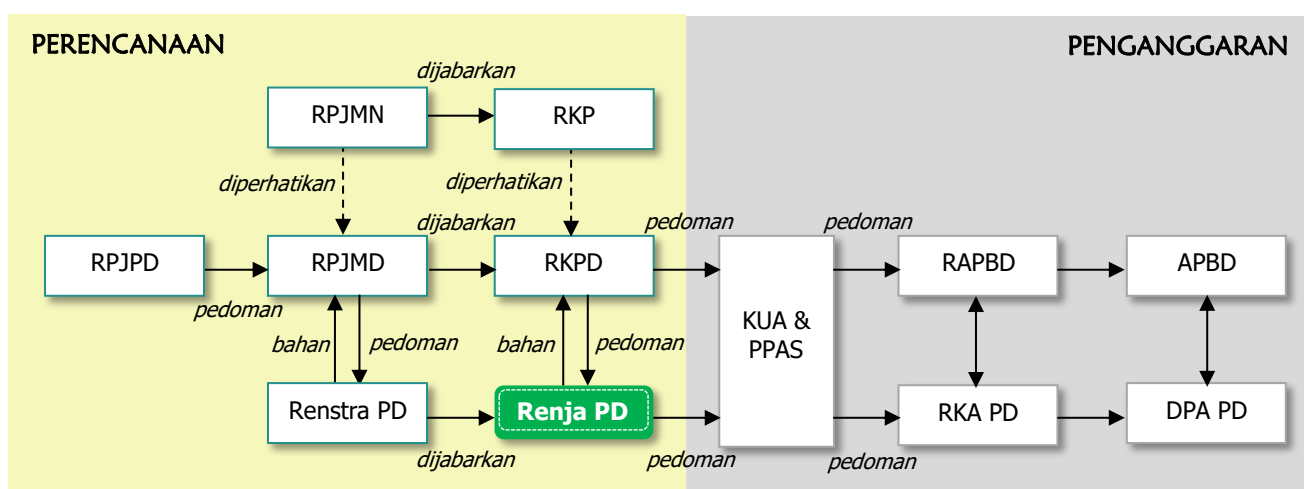
Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD.....I-1

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka untuk penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Nomor B/210/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota

- Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
 - t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
 - w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
 - x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35);

- y. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Nomor B/210/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
Arah Kebijakan : Pelaporan kinerja dan keuangan OPD										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100% (20%)	100% (40%)	100% (40%)	100%	100% (60%)	100% (60%)	60%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	46 dok	9 dok	9 dok	9 dok	100%	9 dok	27 dok	58,69%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	10 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	6 dok	60%
		Jumlah Dokumen RTP	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	15 dok	3 dok	3 dok	4 dok	133,33%	3 Laporan	10 dok	66,67%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100% (20%)	100% (40%)	100% (40%)	100%	100% (60%)	100% (60%)	60%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100% (20%)	100% (40%)	100% (40%)	100%	100% (60%)	100% (60%)	60%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	6 jenis	15 Paket	15 Paket	100%	5 Paket	3 jenis	100%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 jenis	8 jenis	2 Paket	2 Paket	100%	5 Paket	5 Jenis	100%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	35 jenis	3 Paket	3 Paket	100%	20 Paket	35 Jenis	100%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	8 jenis	10 Paket	10 Paket	100%	7 Paket	8 Jenis	100%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	500 orang	1530 orang	12 Laporan	12 Laporan	100%	50 Laporan	300 Orang	60%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 kegiatan	117 keg	12 Laporan	12 Laporan	100%	50 Laporan	300 Kegiatan	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	2 jenis	3 Dokumen	4 Dokumen	133,33%	2 Dokumen	5 Jenis	100%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100% (20%)	100%	100% (40%)	100%	100%	100% (60%)	60%
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	3 jenis	6 jenis	14 Unit	14 Unit	100%	3 Unit	3 Jenis	100%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 jenis	4 jenis	3 Unit	3 Unit	100%	2 Unit	2 Jenis	100%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100% (20%)	100%	100% (40%)	100%	100%	100% (60%)	60%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100% (20%)	100%	100% (40%)	100%	100%	100% (60%)	60%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100% (20%)	100%	100% (40%)	100%	100%	100% (60%)	60%
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100%	24 Unit	25 Unit	100%
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	3 jenis	0	3	3	100%	1 Unit	3 Jenis	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 jenis	5 jenis	63 Unit	63 Unit	100%	30 Unit	5 Jenis	100%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Rehabilitasi Gedung Kantor	100%	-	1 Unit	1 Unit	100%	-	1 Unit	100%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100% (20%)	100%	100% (40%)	100%	100%	100% (60%)	60%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100% (20%)	100%	100% (40%)	100%	100%	100% (60%)	60%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100% (20%)	100%	100% (40%)	100%	100%	100% (60%)	60%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100% (20%)	100%	100% (40%)	100%	100%	100% (60%)	60%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	15 dok	3 dok	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 dok	9 dok	60%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 dok	1 dok	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 dok	60%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10 dok	2 dok	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 dok	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3% (100%)	10,6% (0,6%)	3%	0,58%	19,33%	3%	3%	100%
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	75 koperasi	30 koperasi	15 koperasi	1 koperasi	6,67%	15 koperasi	46 koperasi	61,33%
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	150 koperasi	30 koperasi	80 Unit Usaha	160 Unit Usaha	200%	25 Unit Usaha	215 Unit Usaha	143,33%
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	10 koperasi	1 koperasi	2 koperasi	0 koperasi	0%	2 koperasi	3 koperasi	30%
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	150 koperasi	186 koperasi	140 Unit Usaha	152 Unit Usaha	108,57%	25 Unit Usaha	363 Unit Usaha	242%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50% (100%)	50,55% (10,1)	50% (10%)	50,68%	101,36%	50%	50%	100%
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	120 koperasi	370 koperasi	100 koperasi	373 koperasi	373%	100 koperasi	373 koperasi	310,83%
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	175 koperasi	250 koperasi	370 Unit Usaha	250 Unit Usaha	67,57%	-	250 Unit Usaha	142,86%
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	175 koperasi	120 koperasi	240 Unit Usaha	240 Unit Usaha	100%	-	240 Unit Usaha	208,33%
2.17.03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	-	-	-	-	250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	142,86%
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	30% (100%)	56,25%	31%	50,75%	163,71%	32%	32%	100%
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	70%	67,99%	67%	67,4%	100,59%	68%	68%	97,14%
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	300 koperasi	240 koperasi	300 Unit Usaha	335 Unit Usaha	111,67%	250 Unit Usaha	250 unit usaha	83,33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10% (100%)	45,36%	10% (2%)	45,52%	455,2%	10%	10%	100%
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	80%	76,63%	72%	75,3%	104,58%	75%	75%	93,75%
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	400 Orang	480 orang	240 orang	482 orang	200,83%	200 Orang	482 orang	120,5%
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1% (100%)	20,38%	1%	2,1%	210%	1%	1%	100%
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha mikro yang meningkat Pengetahuan dan Ketrampilan	75%	70%	-	-	-	-	-	93,33%
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan	750 Orang	540 orang	-	-	-	-	-	72%
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	25%	26,37%	26%	27,34%	105,15%	27%	27%	108%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	60%	50%	56,28%	112,56%	50%	50%	100%
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Penguatan dan Perlindungan Koperasi	150 koperasi	164 koperasi	80 koperasi	80 koperasi	100%	-	244 koperasi	162,67%
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan	125 koperasi	340 koperasi	60 koperasi	60 koperasi	100%	-	400 koperasi	320%
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Usaha	200 koperasi	120 koperasi	200 koperasi	200 koperasi	100%	-	320 koperasi	160%
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Kelembagaan	300 koperasi	620 koperasi	480 koperasi	480 koperasi	100%	-	480 Koperasi	160%
		Jumlah laporan updating data Koperasi	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	24 Laporan	40%
		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-	-	-	-	-	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	6,24%	3%	6,02%	200,67%	3%	3%	100%
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.000 orang	1213 orang	600 orang	1.806 orang	301%	600 orang	3.619 orang	120,63%
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pendampingan usaha	500 Orang	649 Orang	100 Unit Usaha	635 Unit Usaha	635%	-	635 Unit Usaha	127%
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kemitraan usaha	500 orang	450 orang	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	100%	100 Unit Usaha	750 Unit Usaha	150%
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan kelembagaan dan usahanya	1000 orang	650 orang	410 Unit Usaha	491 Unit Usaha	119,76%	200 Unit Usaha	1341 Unit Usaha	134,1%
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas akses pembiayaan	1000 orang	500 orang	605 Orang	580 orang	95,87%	200 Orang	1280 Orang	128%
2.17.07.2.01.15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	750 orang	-	900 Orang	900 orang	100%	200 Orang	1100 Orang	146,67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20% (100%)	47,89%	20%	32,45%	162,25%	20%	20%	100%
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	600 orang	400 orang	100 orang	1300 orang	1.300%	100 Orang	1800 orang	300%
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3000 orang	2380 orang	1300 Unit Usaha	1300 Unit Usaha	100%	-	3680 orang	122,67%
		Pengembangan Co Working Space	1 paket	-	1 paket	1 paket	100%	-	1 paket	100%
2.17.08.2.01.06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	-	-	-	-	-	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	100%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang melaksanakan 8 Program, 14 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

- a. Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD
- b. Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur
- c. Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi.

4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

Persentase Koperasi sehat.

5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

- a. Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan
- b. Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan

6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

Persentase koperasi yang meningkat omsetnya.

7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan.

8) Program Pengembangan UMKM

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		31.826.684.236	28.491.532.033	89,52
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG				
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.674.610.355	10.717.987.308	91,81
2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.195.580	5.457.795	44,75
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	564.080	411.200	72,90
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.117.280	2.409.000	77,28
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.729.190	867.500	23,26
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.610.080	308.980	19,19
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.961.990	380.300	19,38
06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.212.960	1.080.815	89,11
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.293.676.908	7.838.001.144	94,51
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.070.065.228	7.628.594.894	94,53
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	222.320.000	209.160.000	94,08
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	596.480	0	0
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	695.200	246.250	35,42
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.176.052.456	975.080.412	82,91
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	259.807.069	218.365.450	84,05
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.268.890	16.656.000	96,45
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.076.870	31.083.200	54,46

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.900.059	14.901.290	51,56
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	1.140.000	59,38
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	54.000.000	45.113.400	83,54
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	577.397.860	477.821.072	82,75
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	179.681.708	170.000.000	94,61
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	668.189.134	616.120.000	92,21
05	Pengadaan Mebel	617.664.398	579.460.000	93,81
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.524.736	36.660.000	72,56
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.640.000	72.195.342	61,90
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.640.000	72.195.342	61,90
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.407.856.277	1.211.132.615	86,03
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	36.318.110	99,99
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	348.054.470	235.730.606	67,73
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.299.720	36.881.820	77,97
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	976.183.907	902.202.079	92,42
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	214.521.290	179.015.180	83,45
2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	91.666.650	80.950.580	88,31
01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	91.666.650	80.950.580	88,31
2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	122.854.640	98.064.600	79,82

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	122.854.640	98.064.600	79,82
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	423.919.290	322.487.720	76,07
2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	423.919.290	322.487.720	76,07
01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	132.027.000	101.814.100	77,12
02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	291.892.290	220.673.620	75,60
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	366.205.089	289.851.039	79,15
2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	366.205.089	289.851.039	79,15
01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	366.205.089	289.851.039	79,15
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	569.033.650	519.405.316	91,28
2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	569.033.650	519.405.316	91,28
01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	569.033.650	519.405.316	91,28
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.644.277.614	2.147.640.122	81,22
2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.644.277.614	2.147.640.122	81,22
01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi. dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.644.277.614	2.147.640.122	81,22
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.712.800.110	3.075.913.298	82,85
2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizina, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.712.800.110	3.075.913.298	82,85

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	274.550.700	255.706.608	93,14
02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	168.579.010	139.171.520	82,56
04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.311.148.000	984.988.416	75,12
05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	436.272.910	331.668.404	76,02
06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1.522.249.490	1.364.378.350	89,63
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	12.221.316.838	11.239.232.050	91,96
2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	12.221.316.838	11.239.232.050	91,96
01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan. Pemasaran. SDM. serta Desain dan Teknologi	12.221.316.838	11.239.232.050	91,96

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 8 program, 16 kegiatan dan 38 sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebesar Rp 31.826.684.236,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 28.491.532.033,- atau sebesar 89,52 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.335.152.203,- atau sebesar 10,48 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah melaksanakan fungsi sebagai Dinas Teknis di bidang koperasi dan UKM yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan dituangkan pada penetapan IKU Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	50.70	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	65,42	58,91	55.00	56.00
Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	10.24	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	16,93	17,17	14.00	15.00
Sasaran :											
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase Koperasi aktif	88.72	76.00	76.50	77.00	77.50	78.00	76,63	77,04	77.00	77.50
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77.13	77.20	77.50	77.75	78.00	78.50	79,71	80	77.75	78.00
Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	20.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	40,58	42,53	40.00	45.00

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

- 1) **“Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “persentase koperasi yang berkualitas”.

Pada tahun 2023 realisasinya indikator ini adalah sebesar 58,91% dari target sebesar 54,00% (capaian sebesar 109,09%); dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset dibagi jumlah seluruh koperasi (aktif) = $334/567 \times 100\%$

- 2) **“Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha”.

Pada tahun 2023 realisasinya indikator ini adalah sebesar 17,17% dari target sebesar 13,00% (capaian 132,08%), dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah usaha mikro yang mejadi wirausaha dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan = $30.024/174.861 \times 100\%$

b. Sasaran :

- 1) **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi”** dengan indikator “Persentase koperasi aktif”.

Pada tahun 2023 realisasinya indikator ini adalah sebesar 77,04% dari target sebesar 76,50% (capaian 100,71%), dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah Koperasi Aktif dibagi jumlah seluruh koperasi = $567/736 \times 100\%$

- 2) **“Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** dengan indikator “Nilai AKIP”

Pada tahun 2023 AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendapat nilai 80 dari target sebesar 77,50 (capaian 103,23%).

- 3) **“Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro”** dengan indikator “Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro”.

Pada tahun 2023 realisasinya indikator ini adalah sebesar 42,53% dari target sebesar 35% (capaian 121,51%). dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah wirausaha baru yg berskala mikro tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi jumlah wirausaha berskala mikro tahun 2021 = $(30.024-21.064)/21.065 \times 100\%$.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga dapat dilihat dari capaian indikator Kinerja Program serta Kinerja Pelayanan urusan, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Program dan Palayanan Kinerja Urusan
pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023				REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	TINGKAT CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM :						
1.	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
2.	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
3.	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
4.	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	0,58%	19,33	Sangat Rendah	11.48%
5.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	50.68%	101,36%	Sangat Tinggi	50,55 %
6.	Persentase Koperasi sehat	31%	50,75%	163,71	Sangat Tinggi	56,25 %
7.	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	45,52%	455,2	Sangat Tinggi	35,66 %
8.	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	26%	27,34%	105,15	Sangat Tinggi	26,37 %
9.	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
10.	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	6,02%	200,67	Sangat Tinggi	6,24 %
11.	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	32,45%	162,25	Sangat Tinggi	47,89 %
KINERJA PELAYANAN URUSAN:						
1	Persentase Fasilitasi Penerbitan NIK (Nomor Induk Koperasi)	47%	80,03%	170,28%	Sangat Tinggi	76,09%
2	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	5%	5,03%	100,60%	Sangat Tinggi	6,06%

3	Persentase Pelaku usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	4%	8,04	201%	Sangat Tinggi	7,96
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	13%	17,17%	132,08%	Sangat Tinggi	16,93%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

Dari Tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dari 11 indikator Kinerja Program yang ditargetkan pada Tahun 2023, 10 indikator berhasil dicapai dengan tingkat capaian Sangat Tinggi dan 1 indikator dengan capaian sangat rendah. Tidak tercapainya target tersebut karena adanya Kebijakan moratorium Pelaksanaan perijinan Usaha Simpan Pinjam termasuk didalamnya izin Pembukaan Kantor cabang, Cabang Pembantu, kantor kas usaha simpan pinjam koperasi berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Koperasi dan UKM No. 2 Tahun 2023 tentang Moratorium Pelaksanaan Perijinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang diperpanjang dengan Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM No. 3 Tahun 2023 sehingga Proses Pemberian Ijin usaha Pinjam Koperasi terhenti sementara menunggu Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM RI selanjutnya. Sedangkan 4 indikator Kinerja Pelayanan Urusan semuanya dapat dicapai dengan Tingkat capaian sangat tinggi.

Selain dari aspek capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASIKINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100,00 %, dimana 8 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00 %, dimana 8 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2023.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa target yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 sebagian besar capaiannya 100%, bahkan beberapa indikator capaiannya melampaui 100%.
- b. Pembinaan dan fasilitasi terhadap koperasi memberikan hasil yang positif diantaranya prosentase koperasi aktif mencapai 77,04% dari seluruh koperasi yang tercatat sebanyak 736 unit koperasi dan koperasi aktif sebanyak 567 unit koperasi. Capaian tersebut meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang sebesar 76,63%.
- c. Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang mendapat fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2023 meningkat menjadi 27,34% dari total pelaku usaha mikro pada Tahun 2023 sejumlah 30.024 orang. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 yang sebesar 26,37%.
- d. Sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 34 Koperasi dan 2.361 Pelaku Usaha Mikro dapat terfasilitasi untuk mengakses permodalan dari dana APBD Kota Semarang melalui Kredit Wibawa.
- e. Sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 2.142 usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi sertifikasi Produk berupa PIRT, Halal dan HAKI.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Koperasi dan UKM diantaranya :

1. Belum optimalnya Pengelolaan Koperasi sesuai peraturan perkoperasian.
Hal ini antara lain disebabkan masih terbatasnya kualitas dan kompetensi SDM pengelola koperasi.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk menghadapi masalah ini adalah dengan memberikan fasilitasi Pelatihan, bimbingan teknis dan fasilitasi uji kompetensi bagi pengelola koperasi secara berkelanjutan.

2. Belum optimalnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing.

Hal ini antara lain disebabkan karena Pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha masih bersifat konvensional dan keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro antara lain memberikan fasilitasi pameran baik didalam maupun di luar kota, Fasilitasi kemitraan usaha dengan Marketplace dan toko-toko besar, Fasilitasi Pakcaging, Fasilitasi sertifikasi produk seperti PIRT, Halal, HAKI dan Fasilitasi akses pembiayaan melalui kredit wibawa serta mempertemukan dengan Lembaga perbankan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Lambatnya regenerasi didalam Koperasi.
- 2) Kurangnya kemandirian pelaku usaha mikro
- 3) Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat belum dioptimalkan oleh KUMKM dalam pemasaran.
- 4) Mempertahankan dan meningkatkan kapasitas, kualitas dan produktivitas UMKM agar berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian dan perdagangan global.

b. Peluang

- 1) Tren Pertumbuhan UMKM yang potensial di Kota Semarang.
- 2) Teknologi Informasi dan kesepakatan pasar bebas membuka peluang pasar yang lebih luas.
- 3) Keberpihakan Pemerintah kepada KUMKM melalui Peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya skala usaha, produktivitas dan daya saing koperasi.
- 2) Masih banyaknya produk usaha mikro yang belum memiliki sertifikasi produk antara lain PIRT, Halal dan HAKI.
- 3) Belum optimalnya pelaku usaha mikro dalam pemanfaatan media sosial/marketplace sebagai media pemasaran serta pemanfaatan manajemen usaha dalam pengelolaan usaha.
- 4) Masih terbatasnya informasi pembiayaan dan akses kemitraan baik pemasaran maupun pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dalam pengembangan usahanya.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan Kota Semarang pada RKPD tahun 2025 bersumber dari arah kebijakan pembangunan pada RPJMD 2021-2026 yaitu **“Keberlanjutan Capaian Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Secara Berkesinambungan”** sebagai penuntasan target-target RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Di tahun 2025 ini juga merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, sehingga di tahun 2025 juga merupakan tahun penguatan landasan transformasi menuju pelaksanaan transformasi di tahun 2025-2045, dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan **infrastruktur** yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas **ekonomi** yang tangguh dan berkeadilan;

- Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan **pengangguran**, penurunan **kemiskinan** serta penghapusan **kemiskinan ekstrem**;
- Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas **Sumber Daya Manusia** yang unggul dan produktif;
- Prioritas Daerah 5. Peningkatan **tata kelola pemerintahan** yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan **penyediaan infrastruktur** yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
 - a. Penanganan genangan banjir dan rob
 - b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
 - c. Penataan kawasan strategis perkotaan
 - d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
 - e. Penanganan kawasan kumuh
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
 - g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas **ekonomi** yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
 - b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
 - c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
 - d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
 - e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan **pengangguran**, penurunan **kemiskinan** serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
 - b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin

- c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
 - d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas **Sumber Daya Manusia** yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
- a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
 - b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan **tata kelola pemerintahan** yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
- a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
 - c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendukung pencapaian prioritas kedua, yaitu **“Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan”**.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif		
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					25.428.592.490	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					25.488.592.490
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Semarang	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	150.000.000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Semarang	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	150.000.000		
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 kop	75.000.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 Koperasi	75.000.000		
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	75.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	75.000.000		
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 kop	75.000.000	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 Koperasi	75.000.000		
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	75.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	75.000.000		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	504.320.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	504.320.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 kop	504.320.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 kop	504.320.000	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	250 Unit Usaha	504.320.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	250 Unit Usaha	504.320.000	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Semarang	Persentase Koperasi sehat	33%	394.320.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Semarang	Persentase Koperasi sehat	33%	394.320.000	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	69%	394.320.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	69%	394.320.000	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 Unit Usaha	394.320.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 Unit Usaha	394.320.000	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Semarang	Kota Semarang	10%	601.700.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Semarang	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	601.700.000	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	77%	601.700.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	77%	601.700.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	520 org	601.700.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	520 org	601.700.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	28%	2.060.280.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	28%	2.060.280.000	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	2.060.280.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	2.060.280.000	
	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20 Kelompok Masyarakat	405.000.000	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20 Kelompok Masyarakat	405.000.000	
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500 Unit Usaha	1.655.280.000	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500 Unit Usaha	1.655.280.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Semarang	Kota Semarang	3%	4.300.294.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Semarang	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	4.360.294.000	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 org	4.300.294.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 org	4.360.294.000	
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 Unit Usaha	228.700.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 Unit Usaha	228.700.000	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	90 Unit Usaha	50.000.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	90 Unit Usaha	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Usaha Mikro					Usaha Mikro				
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	120 Unit Usaha	210.270.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	120 Unit Usaha	210.270.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	490 org	1.201.410.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	490 Orang	1.201.410.000	
	Pemulihan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	350 Unit usaha	203.830.000	Pemulihan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	350 Unit usaha	203.830.000	
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	400 unit usaha	1.149.184.000	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	400 unit usaha	1.149.184.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	880 org	1.256.900.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	880 org	1.316.900.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	3.515.784.338	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	3.515.784.338	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 org	3.515.784.338	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 org	3.515.784.338	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1200 Unit Usaha	3.515.784.338	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1.200 Unit Usaha	3.515.784.338	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	NON URUSAN					NON URUSAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	13.901.894.152	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	13.901.894.152	
		Kota Semarang	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%			Kota Semarang	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%		
		Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dok	109.849.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dok	109.849.400	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	51.143.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	51.143.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1.891.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1.891.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	2.290.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	2.290.900	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1.179.400	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1.179.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1.458.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1.458.900	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.885.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.885.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	2 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	2 Dokumen	50.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	12.075.891.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	12.075.891.600	
			Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%				Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 org/bln	11.805.218.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 org/bln	11.805.218.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	269.664.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	269.664.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	448.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	448.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1 Laporan	561.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1 Laporan	561.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	861.267.355	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	861.267.355	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	171.784.366	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	171.784.366	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	22.114.840	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	22.114.840	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	40.000.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	40.000.300	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	26.020.437	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	26.020.437	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.920.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.920.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	409.751.860	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	409.751.860	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	149.675.552	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	149.675.552	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	53.101.912	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	53.101.912	
	Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	7.284.264	Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	7.284.264	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	45.817.648	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	45.817.648	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	313.530.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	313.530.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	313.530.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	313.530.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	488.253.885	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	488.253.885	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.603.603	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.603.603	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	401.550.296	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	401.550.296	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	47.099.986	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	47.099.986	

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 2. 7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Pelatihan Manajemen dan Administrasi Usaha	Kelurahan Plalangan	1 Kegiatan	Diakomodir
2.	Sosialisasi Legalitas Usaha	Kelurahan Plalangan	1 Kegiatan	Diakomodir
3.	Sosialisasi Pemasaran melalui Market Place	Kelurahan Plalangan	1 Kegiatan	Diakomodir
4.	Pelatihan ber Koperasi bagi Pengurus dan Anggota UMKM Kelurahan Sadeng	Kelurahan Sadeng	1 Kegiatan	Diakomodir
5.	Bantuan Modal usaha ekonomi Produktif bagi UMKM	Kelurahan Sendangmulyo	25 Orang	Tidak diakomodir (Dinas hanya memfasilitasi akses Pembiayaan bukan Bantuan Modal Usaha)
6.	Bazar UMKM se kelurahan Bulusan	Kelurahan Bulusan	1 Kegiatan	Tidak diakomodir karena Dinkop menyelenggarakan pameran pada Tingkat Kota (bisa diakomodir Kecamatan)
7.	Pelatihan pemasaran dan manajemen usaha	Kelurahan Sambiroto	60 Orang	Diakomodir

8.	Pelatihan pembuatan garnis dan pelatihan packing	Kelurahan Sambiroto	60 Orang	Diakomodir
9.	Pelatihan Penentuan Harga Jual dan Costing Bagi UMKM Agar Tidak Rugi	Kelurahan Jangli	50 Orang	Diakomodir (Pelatihan Manajemen Kewirausahaan)
10.	UMKM Kelurahan Kedungmundu pemasaran secara online kurang berjalan	Kelurahan Kedungmundu	50 Orang	Diakomodir (Pelatihan digitalisasi Pemasaran)
11.	Pelatihan packadging produk UMKM Kampung Tematik Hasta Karya	Kelurahan Tembalang	1 Kegiatan	Diakomodir dengan catatan perlu Kejelasan jenis Produknya
12.	Pelatihan Manajemen pemasaran produk UMKM Kampung Tematik Hasta Karya	Kelurahan Tembalang	1 Kegiatan	Diakomodir
13.	Pelatihan Sertifikasi Produk UMKM	Kelurahan Tambakrejo	1 Kegiatan	Diakomodir dengan catatan perlu Kejelasan jenis sertifikasi produknya (Halal, PIRT,HAKI)

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

Disamping itu juga terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, yaitu :

1. Event yang dapat menggerakkan roda perekonomian di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan agar ditingkatkan terutama pemberdayaan UMKM.
2. Pemkot Semarang diharapkan membantu UMKM dengan modal usaha, alat dan juga pelatihan agar lebih memaksimalkan produktivitas usahanya.
3. Diperlukan peningkatan perekonomian masyarakat dengan menumbuhkan kembangkan ekonomi kreatif. Program pemberdayaan rumah tangga melalui program penguatan UMKM, pelatihan-pelatihan usaha mikro masyarakat dan pemberian bantuan sarana usaha produktif.
4. Perlu pelatihan Marketing di jaman digital untuk UMKM
5. Perlu upgrade UMKM di jaman digital
6. Perlu peningkatan produktivitas UMKM

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

III.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan, antara lain:

1. Transformasi Sosial, dengan arah kebijakan:
 - a) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua;
 - b) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata;
 - c) Perlindungan sosial yang adaptif yang berfokus pada peletakan fondasi awal reformasi perlindungan sosial menjadi lebih adaptif dan inklusif, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk sesuai kondisi kerentanan, serta mendorong penduduk miskin dan rentan untuk mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan.
2. Transformasi Ekonomi, dengan arah kebijakan:
 - a) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
 - b) Penerapan Ekonomi Hijau;
 - c) Transformasi Digital;
 - d) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
 - e) Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola, dengan arah kebijakan:
 - a) Bidang pelayanan publik berfokus pada transformasi dan digitalisasi pelayanan publik;
 - b) Bidang proses bisnis dan kelembagaan;
 - c) Bidang manajemen Aparatur Sipil Negara berfokus pada pembenahan kelembagaan dan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara serta perbaikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
 - d) Bidang pengawasan Pembangunan;
 - e) Bidang partai politif berfokus pada penguatan integrasi partai politik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola partai politik yang berintegritas dalam mendukung terwujudnya demokrasi substansial.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, dengan arah kebijakan:
 - a) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial;
 - b) Stabilitas ekonomi makro;
 - c) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gantar kawasan.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan arah kebijakan:
 - a) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju;
 - b) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
 - c) Lingkungan Hidup Berkualitas;
 - d) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
 - e) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”**. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
 - a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjada konsivitas daerah;

- b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
 - c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
 - d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI, pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur serta kompensasi;
 - e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
- a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata peningkatkan kualitas pembelajaran berbasis soft skill dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal, budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana, pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi, serta perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;
 - b. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana dan sarana, pemenuhan jumlah dan distribusi sumber daya

- manusia (SDM) kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan baseline data, pemenuhan SOP, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan, penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi, identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan, peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya TB, malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta kejadian luar biasa (KLB)/krisis kesehatan, pemerataan kapasitas fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta, revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga, serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, meningkatkan penyediaan sarpras olahraga memadai dan terjangkau, pembinaan dan pelatihan atlet;
 - d. Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM;
 - e. Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda;
 - f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai platform termasuk platform digital;
 - g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
 - h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jenjang penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak

- (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.
 - a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (TPST Regional, IPLT Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemai air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan epatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan provinsi, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
 - c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;

- d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/early warning system (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.
4. Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:
 - a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk di dalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset yang didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;
 - b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui peningkatan peran masyarakat melalui co-creator.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60 persen;
3. Inflasi sebesar $2,5 \pm 1$ persen;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60 persen.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,80 – 6,50%	84,80 – 85,80	3,98 – 3,74%	5,61 – 5,31%
Prov. Jateng	4,80 – 5,60%	73,99	9,28 – 8,08%	5,20 – 4,60%
Pusat	5,30 – 5,60%	73,99 – 74,02	7,00 – 8,00 %	4,50 – 5,00%

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

1. **Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi**, dengan indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas
2. **Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro**, dengan indikator Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi**, dengan indikator sasaran Persentase Koperasi Aktif.
2. **Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro**, dengan indikator Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro.
3. **Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah**, dengan indikator Nilai AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN 1				
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi		Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	56
	SASARAN 1			
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase Koperasi aktif	%	77,5
	SASARAN 2			
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	%	80,25
TUJUAN 2				
Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro		Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha	%	15
	SASARAN 1			
	Meningkatnya pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	45

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

IV.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mepedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mepedomani Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara khusus, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki peran dalam pencapaian misi kedua, yaitu **“Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.”**
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;

7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 8 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 7 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 8 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 40 sub kegiatan, yang terdiri dari 25 sub kegiatan penunjang, dan 15 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 25.488.592.490,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capain Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					25.488.592.490					27.594.432.740	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	150.000.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3%	173.000.000
	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 kop	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 kop	75.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 kop	87.000.000
	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	75.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Unit Usaha	87.000.000
	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 kop	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 kop	75.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 kop	86.000.000
	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	75.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Unit Usaha	86.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	504.320.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50%	560.000.000
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 kop	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 kop	504.320.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120 kop	560.000.000
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	250 Unit Usaha	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	250 Unit Usaha	504.320.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		175 Unit Usaha	560.000.000
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	33%	Persentase Koperasi sehat	33%	394.320.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35%	410.000.000
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	68%	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	68%	394.320.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70%	410.000.000
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 Unit Usaha	394.320.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300 Unit Usaha	410.000.000
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	601.700.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10%	720.000.000
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	77%	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	77%	601.700.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80%	720.000.000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	520 org	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	520 org	601.700.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		580 org	720.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	28%	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	28%	2.060.280.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30%	2.750.000.000
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	2.060.280.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50%	2.750.000.000
	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20 Kelompok Masyarakat	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20 Kelompok Masyarakat	405.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Kelompok Masyarakat	410.000.000
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500 Unit Usaha	1.655.280.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500 Unit Usaha	2.750.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Semarang	3%	Kota Semarang	3%	4.360.294.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3%	3.680.000.000
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 org	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 org	4.360.294.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		600 org	3.680.000.000
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 Unit Usaha	228.700.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Unit Usaha	240.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	90 Unit Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	90 Unit Usaha	50.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90 Unit Usaha	55.000.000
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	120 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	120 Unit Usaha	210.270.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		410 Unit Usaha	1.600.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi	400 org	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi	400 org	1.201.410.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500 org	475.000.000
	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	250 Unit usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	250 Unit usaha	203.830.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250 Unit usaha	155.000.000
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	300 unit usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	300 unit usaha	1.149.184.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300 unit usaha	949.184.000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	640 org	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	640 org	1.316.900.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		640 org	1.365.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	3.515.784.338	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25%	5.475.000.000
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 org	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 org	3.515.784.338	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200 org	5.475.000.000
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1.000 Unit Usaha	3.515.784.338	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.000 Unit Usaha	5.475.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	NON URUSAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	13.901.894.152	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	14.260.248.740
		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%		Kota Semarang			100%	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		Kota Semarang			100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dok	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dok	109.849.400	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 dok	64.493.300
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	51.143.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 dok	29.738.600
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1.891.400	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dok	3.658.900
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	2.290.900	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dok	4.258.900
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1.179.400	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dok	1.934.900
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1.458.900	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dok	2.234.900
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.885.800	Dinas Koperasi dan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	22.667.100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
							Usaha Mikro				
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	2 Dokumen	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	2 Dokumen	50.000.000					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	12.075.891.600	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 dok	10.433.634.600
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%					100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 org/bln	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 org/bln	11.805.218.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		64 org/bln	10.181.984.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	269.664.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 dok	250.080.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	448.600	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	673.400
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1 Laporan	561.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	897.200
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	861.267.355	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	928.920.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	171.784.366	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 paket	180.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	22.114.840	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 paket	30.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	40.000.300	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35 paket	55.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	26.020.437	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8 paket	32.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.920.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	1.920.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Laporan	60.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	409.751.860	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Laporan	480.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	149.675.552	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Dokumen	90.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	53.101.912	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	50.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	7.284.264	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 unit	25.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	45.817.648	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	25.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	313.530.000	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	320.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	313.530.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	320.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	488.253.885	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	2.463.200.840
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.603.603	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	39.950.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	401.550.296	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25 Unit	370.250.840
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	47.099.986	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Unit	50.000.000

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Nomor B/210/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan Peraturan Presiden RI No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian indikator sub kegiatan dan penambahan Sub Kegiatan yang harus dimunculkan.

3. Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

Semarang, 30 Juli 2024

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

FX BAMBANG SURANGGONO, S.Sos

